

BAB 1

Pendahuluan

1.1. VISI DAN MISI PEMBANGUNAN DAERAH

Sesuai Pasal 5 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional disusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Jambi yang menjabarkan visi, misi, dan program Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih selama 5 (lima) tahun.

Visi dan Misi Gubernur dan Wakil Gubernur ditempuh melalui Strategi Pokok yang dijabarkan dalam Agenda Pembangunan Daerah Provinsi Jambi yang memuat Sasaran-Sasaran Pokok yang harus dicapai, arah kebijakan, dan program-program pembangunan.

Berdasarkan permasalahan, tantangan, serta keterbatasan yang dihadapi Provinsi Jambi, ditetapkan **VISI PEMBANGUNAN PROVINSI JAMBI TAHUN 2006 - 2010**, yaitu **JAMBI MAMPU, MAJU DAN MANDIRI**. Selanjutnya berdasarkan visi pembangunan Provinsi Jambi tersebut ditetapkan 5 (lima) **MISI PEMBANGUNAN** yaitu :

Misi Pembangunan Provinsi Jambi Tahun 2006 - 2010, yaitu :

1. Peningkatan kesejahteraan dan kualitas kehidupan masyarakat
2. Peningkatan daya saing dan kemandirian daerah
3. Peningkatan pembangunan prasarana dan sarana dasar
4. Peningkatan kualitas pelayanan publik.
5. Peningkatan perlindungan masyarakat

1.2. STRATEGI PEMBANGUNAN DAERAH

Di dalam mendukung terwujudnya visi dan menjalankan misi pembangunan Provinsi Jambi tersebut maka didukung oleh 3 pilar utama, yaitu :

1. Pemerintah Yang Berwibawa dan Bersih dari KKN

Guna menjamin efektivitas dan efisiennya jalan pemerintahan dalam mencapai visi serta menjalankan misi yang telah ditetapkan maka harus dimulai dari adanya jaminan pemerintahan yang berwibawa dan bersih dari KKN. Setiap kebijakan diharapkan berjalan sesuai dengan jalur dan tepat mencapai sasaran tanpa adanya distorsi dalam proses pengimplikasiannya.

2. Sumber Daya Manusia Sebagai Penggerak Pembangunan

Peningkatan kualitas dan pengoptimalisasian potensi sumber daya manusia daerah merupakan modal utama sebagai penggerak pembangunan Provinsi Jambi. Penguasaan atas potensi, permasalahan, serta kemampuan dalam merumuskan strategi kebijakan pembangunan daerah sangat tergantung pada ketersediaan sumber daya manusia yang ada. Oleh sebab itu, kemampuan sumber daya

manusia Provinsi Jambi sebagai penggerak pembangunan merupakan salah satu pilar dalam pembangunan.

3. Potensi Sumber Daya Alam Daerah yang Siap Untuk Digali Dalam Mengaxerelasikan Roda Pembangunan.

Penggalian dan pemanfaatan potensi sumber daya alam daerah dalam mengaxerelasikan roda pembangunan merupakan pilar pembangunan Provinsi Jambi. Peningkatan nilai ekonomi, minimalisasi ketergantungan daerah, perluasan lapangan kerja, peningkatan pendapatan masyarakat dan pengembangan ekonomi daerah merupakan dampak langsung dari pengoptimalisasian sumber daya alam daerah sebagai modal pembangunan ekonomi.

1.3. AGENDA PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI JAMBI TAHUN 2006 - 2010

Proses pembangunan yang berlangsung selama ini, telah menghasilkan kemajuan. Namun demikian tetap menyisakan permasalahan baik yang mendasar maupun permasalahan yang berkembang dewasa ini. Reformasi yang berjalan telah memberi perubahan yang lebih baik. Meskipun demikian, berbagai permasalahan mendasar menuntut perhatian khusus dalam membangun ke depan, diantaranya adalah : (1) masih perlunya memperkuat karakter masyarakat dalam membangun daerah; (2) masih perlunya membenahi sistem pembangunan, pemerintahan, dan pembangunan yang berkelanjutan; (3) perlunya mengembangkan nasionalisme kemanusiaan serta demokrasi politik dan ekonomi; serta (4) kegamangan dalam menghadapi masa depan serta rentannya sistem pembangunan dan pemerintahan dalam menghadapi perubahan.

Berbagai permasalahan tersebut memberi pengaruh terhadap sistem pemerintahan. Penanganan yang tidak sistemik terhadap permasalahan tersebut akan melahirkan persoalan baru yang berkembang dewasa ini baik di bidang ekonomi, sosial, politik, kelembagaan, maupun keamanan. Permasalahan mendasar ini perlu ditangani secara berkelanjutan dalam jangka panjang. Pemecahan terhadap permasalahan-permasalahan baru yang berkembang dewasa ini harus pula merupakan langkah awal pemecahan masalah mendasar tersebut.

Berdasarkan visi, misi, dan strategi pembangunan di atas disusun 4 (empat) **AGENDA PEMBANGUNAN PROVINSI JAMBI TAHUN 2006 - 2010**, yaitu :

1. Meningkatkan Daya Saing Ekonomi
 - 1.1. Peningkatan Stabilitas Ekonomi Makro Daerah
 - 1.2. Peningkatan Investasi dan Eksport Non Migas
 - 1.3. Peningkatan Lapangan Usaha dan Kesempatan Kerja
 - 1.4. Peningkatan Daya Saing Agroindustri
 - 1.5. Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
 - 1.6. Peningkatan Pembangunan Infrastruktur
 - 1.7. Peningkatan Kualitas Pengelolaan BUMD
2. Meningkatkan Kemampuan dan Pemerataan Pembangunan Daerah
 - 2.1. Peningkatan Kemampuan dan Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
 - 2.2. Peningkatan Kemampuan Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Pelestarian Lingkungan Hidup
 - 2.3. Peningkatan Pembangunan Pedesaan

-
- 2.4. Revitalisasi Pembangunan Pertanian
 - 2.5. Pengurangan Ketimpangan Pembangunan Antar Daerah dan Kawasan
 - 2.6. Pengurangan Kemiskinan dan Ketimpangan Pendapatan Antar Golongan Masyarakat
3. Meningkatkan Kesejahteraan dan Kehidupan Masyarakat Yang Berkualitas
 - 3.1. Peningkatan Pendidikan Yang Berkualitas
 - 3.2. Peningkatan Mutu dan Layanan Kesehatan
 - 3.3. Peningkatan Kesejahteraan Sosial dan Keluarga Kecil Berkualitas
 - 3.4. Peningkatan Kualitas Kehidupan Beragama
 - 3.5. Peningkatan Peran Pemuda dan pembangunan Olahraga
 - 3.6. Peningkatan Peran Perempuan dan Perlindungan Anak
 - 3.7. Peningkatan Pembangunan Kebudayaan dan Pariwisata Daerah
 4. Meningkatkan Pembangunan Hukum dan Tata Pemerintahan Yang Baik
 - 4.1. Peningkatan Tata Pemerintahan Daerah Yang Baik dan Bertanggung Jawab
 - 4.2. Peningkatan Kesadaran Hukum dan Hak Asasi Manusia
 - 4.3. Peningkatan Peranan Pratana Demokrasi
 - 4.4. Peningkatan Tata Hukum dan Peraturan Perundang-undangan
 - 4.5. Peningkatan Penguatan Implementasi Otonomi Daerah
 - 4.6. Peningkatan Perlindungan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat

1.4. PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Berdasarkan berbagai langkah kebijakan yang terutama dituangkan dalam Bab Pemantapan Stabilitas Ekonomi Makro, stabilitas ekonomi yang mantap selama periode 2006-2010, sebagai prasyarat penting untuk tercapainya pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkesinambungan, akan terus dijaga.

a. Neraca Perdagangan

Perkiraan neraca perdagangan Jambi didasarkan atas tiga asumsi pokok, yaitu perkembangan ekonomi regional, perkembangan ekonomi nasional dan perkembangan ekonomi Jambi. Asumsi perkembangan ekonomi regional mencakup laju pertumbuhan ekonomi, terutama negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia, tingkat inflasi dan tingkat suku bunga. Di dalam negeri, perkiraan neraca perdagangan sangat terkait dengan sasaran laju pertumbuhan ekonomi dan laju pertumbuhan ekspor serta perkiraan pertumbuhan investasi.

Dengan perkiraan membaiknya perkembangan ekonomi regional dan nasional yang didorong oleh pelaksanaan berbagai program pembangunan antara lain untuk peningkatan daya saing ekonomi serta upaya-upaya untuk menciptakan iklim yang kondusif bagi kegiatan ekspor, walaupun persaingan di pasar internasional yang semakin ketat, nilai ekspor nonmigas Jambi dalam periode 2006-2010 diperkirakan meningkat rata-rata sebesar 5,5 persen per tahun. Sementara itu, ekspor migas, khususnya minyak bumi Jambi, sangat tergantung kepada perkembangan harga minyak dunia. Hal ini karena di sisi produksi Indonesia terikat pada kuota yang diberikan OPEC, serta terbatasnya kapasitas produksi minyak bumi dalam negeri.

Harga rata-rata minyak mentah di pasar dunia dalam 5 tahun mendatang diperkirakan akan menurun, setelah harganya yang tinggi dalam tahun 2005.

Dari sisi impor, sejalan dengan pertumbuhan ekonomi dan investasi terutama disektor perdagangan, nilai impor barang-barang konsumsi diperkirakan meningkat rata-rata sebesar 12 persen per tahun. Disisi lain penerimaan dari sektor jasa pariwisata untuk 5 tahun kedepan diperkirakan masih relatif kecil, namun sangat potensi untuk dikembangkan pada masa-masa mendatang terutama daerah Kerinci.

b. Laju Inflasi

Dalam jangka menengah, laju inflasi diarahkan untuk secara bertahap menurun dari sekitar 7,25 persen pada tahun 2004 menjadi 3,0 persen pada tahun 2010. Perkiraan tersebut didasarkan dengan sasaran tingkat inflasi yang rendah dan stabil tetapi dengan tetap memperhatikan pertumbuhan ekonomi. Pencapaian sasaran inflasi tersebut didukung oleh relatif stabilnya harga-harga melalui penyediaan barang-barang kebutuhan masyarakat, hal ini juga dapat terbantu jika nilai kurs rupiah relatif stabil. Jika iklim usaha dan situasi keamanan yang kondusif serta pemerintah daerah mampu mengatasi berbagai hambatan investasi, maka diperkirakan masuknya *capital inflow* ke Jambi melalui investasi baik PMDN maupun PMA.

c. Keuangan Daerah

Ada dua sumber pembiayaan yang memegang peranan penting dalam keuangan daerah di Provinsi Jambi; **Pertama**, sumber pembiayaan yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jambi, yang pelaksanaannya ditetapkan melalui peraturan daerah setiap tahunnya. **Kedua**, sumber pembiayaan yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang di dalamnya terakomodasi dana dekonsentrasi dan dana pinjaman luar negeri.

Penerimaan daerah yang tercermin dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jambi diperoleh dari berbagai sumber diantaranya berasal dari pendapatan asli daerah, berupa sisa lebih perhitungan anggaran tahun yang lalu, pajak dan retribusi daerah, bagi hasil pajak dan bagi hasil bukan pajak, dana perimbangan berupa dana alokasi umum dan penerimaan lain-lain yang sah. Dari semua penerimaan tersebut yang memberikan kontribusi yang cukup besar berasal dari instansi yang lebih tinggi atau bantuan dari pemerintah pusat, sedangkan sumber penerimaan daerah yang berasal dari penerimaan sendiri (PDS) masih terlalu kecil dibandingkan dengan bantuan pusat. Hal ini menunjukkan bahwa, Provinsi Jambi selama ini dalam pembiayaan administrasi pemerintahan dan pembangunannya masih sangat tergantung dari pemerintah pusat, terutama untuk belanja pegawai berupa gaji, yang masih diharapkan dari pemerintah pusat.

Secara umum gambaran perkembangan dan realisasi pendapatan daerah Provinsi Jambi periode 1999/2000 - 2003, memperlihatkan peningkatan yang cukup signifikan. Pada sisi pendapatan daerah, yang terdiri dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu, pendapatan asli daerah, dana perimbangan, pinjaman daerah serta urusan kas dan perhitungan memperlihatkan realisasi yang meningkat dibandingkan dari target yang ditetapkan. Sisa lebih anggaran tahun lalu selama tahun 1999/2000 - 2003 terealisasi sebesar 100% dari target yang ada. Sementara itu untuk pendapatan asli daerah yang terdiri dari pajak dan retribusi daerah, laba hasil usaha dan pendapatan lainnya yang sah, peningkatan setiap tahunnya memperlihatkan realisasi yang melampaui target yang ditetapkan. Realisasi terbesar dialami pada tahun 2001 yaitu sebesar 135,79% dan yang terkecil dialami pada tahun

1999/2000, yaitu sebesar 119,86%, hal ini disebabkan oleh adanya intensifikasi dan ekstensifikasi pajak dan retribusi daerah.

Selama periode yang sama, pendapatan dari dana perimbangan memperlihatkan peningkatan realisasi rata-rata sebesar 99,77% setiap tahunnya. Realisasi yang terbesar dialami pada tahun 2003 yaitu sebesar 107,54%, dan yang terkecil dialami pada tahun 1999/2000, sebesar 94,50%. Sedangkan realisasi urusan kas dan perhitungan yang paling besar dialami pada tahun 2001 sebesar 125,70 % dan yang terkecil dialami pada tahun 2002 sebesar 70,89 %.

Kondisi diatas mengindikasikan bahwa, kontribusi Penerimaan Daerah Sendiri (PDS) yang terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan sisa perhitungan anggaran tahun lalu. Dalam perkembangannya selama periode 1999/2000-2003, memberikan kontribusi yang terus meningkat secara positif, walaupun perkembangannya berfluktuasi meningkat setia tahunnya, akan tetapi masih kecil apabila dibandingkan dengan ketergantungan daerah ini terhadap pemerintah pusat, walaupun tingkat ketergantungan daerah ini terhadap pemerintah pusat setiap tahunnya mengalami penurunan secara presentase, akan tetapi secara nominal bantuan yang diterima pemerintah daerah Provinsi Jambi terus meningkat dalam jumlah yang cukup besar.

Dalam pembiayaan administrasi pemerintahan dan pembangunan yang terakomodasi dalam APBD Provinsi Jambi selama periode 1999/2000 - 2003, secara rata-rata 64,18% diperoleh dari pemerintah pusat atau instansi yang lebih tinggi, sedangkan sisanya sebesar 35,83% diperoleh dari pendapatan asli daerah sendiri. Pada periode tersebut, kontribusi yang cukup besar terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jambi dialami pada tahun 2003, yaitu sebesar Rp.282.658.744.000. dari total APBD Rp. 557.768.060.000. atau sekitar 50,68% berasal dari penerimaan daerah sendiri (PDS) dan sisanya sebesar 49,32% berasal dari instansi yang lebih tinggi atau pemerintah pusat.

Sementara itu, dilihat dari realisasi penerimaan daerah, yang telah memberikan kontribusinya pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jambi selama periode 1999/2000-2003, menunjukkan peningkatan, begitu juga dengan ketergantungan daerah ini terhadap pusat mengalami peningkatan. Realisasi penerimaan daerah sendiri memberikan kontribusi rata-rata sebesar 48,90% setiap tahunnya, hal ini menyebabkan tingkat ketergantungan Provinsi Jambi terhadap pemerintah pusat sebesar 51,10%. Realisasi yang cukup besar dialami daerah ini pada tahun 2003 yaitu sebesar 65,46%, dan yang terkecil dialami pada tahun 1999/2000 yaitu 28%. Kondisi ini mencerminkan bahwa sumber pembiayaan daerah ini masih mengharapkan dari pemerintah pusat, karena objek pajak yang ada di Provinsi sangat terbatas pendapatan daerahnya.

Di sisi pendapatan asli daerah dengan berbagai upaya untuk peningkatan penerimaan pajak daerah, pendapatan retribusi daerah, bagian laba usaha daerah, dan lain-lain pendapatan yang syah terus ditingkatkan, penerimaan pajak diharapkan meningkat sebesar 31,5 persen dari pendapatan daerah setiap tahunnya selama periode 2006-2010. Di sisi belanja daerah, terjadi peningkatan alokasi anggaran untuk sektor pendidikan, kesehatan, meningkatkan akses penduduk untuk mendapatkan perumahan yang layak, meningkatkan ketahanan pangan serta meningkatkan kuantitas dan kualitas infrastruktur di perdesaan. Di samping itu, terjadi penurunan subsidi secara bertahap terutama subsidi yang tidak terarah pada masyarakat miskin (*untargeted subsidy*), dan pengendalian peningkatan anggaran untuk belanja pegawai.

Dari uraian tersebut di atas, meningkatnya kesejahteraan rakyat melalui peningkatan kualitas pertumbuhan, serta didorong oleh pertumbuhan ekonomi sebesar rata-rata 7,6 persen per tahun, dandisertai dengan pemantapan stabilitas ekonomi, akan dapat dicapai. Provinsi Jambi secara bertahap akan mampu

mengurangi tingkat pengangguran dan jumlah penduduk miskin. Kondisi perekonomian seperti ini yang bersinergi dengan keberhasilan dalam melaksanakan berbagai upaya pembangunan lainnya akan membawa Provinsi Jambi pada kemajuan dan membawa masyarakat Jambi pada keadaan yang sejahtera.

d. Kebutuhan Investasi dan Sumber Pembiayaan.

Salah satu masalah yang penting guna mendukung pertumbuhan ekonomi dan basis ekonomi yang baik adalah tingkat efisiensi dari perekonomian, dalam hal ini tingkat efisiensi penggunaan modal. Secara makro efisiensi penggunaan modal dapat diukur dengan konsep ICOR (*Incremental Capital Output Ratio*) yaitu rasio antara proporsi investasi terhadap PDRB dan laju pertumbuhan ekonomi, atau dengan kata lain ICOR merupakan besar satuan kapital (investasi) yang dibutuhkan untuk menciptakan satu satuan produksi (pertumbuhan ekonomi). Dimana semakin rendah nilai ICOR maka pemanfaatan modal dalam proses produksi semakin efisien.

Berdasarkan berbagai langkah perbaikan investasi yang dilakukan di berbagai bidang, tingkat efisiensi kegiatan ekonomi yang diukur dengan *Incremental Capital Output Ratio* (ICOR) diperkirakan mengalami perbaikan. Dalam tahun 2004 ICOR-1 diperkirakan sebesar 4,0; kemudian menurun menjadi 3,3 dalam tahun 2010.

Berdasarkan perkiraan tingkat efisiensi investasi tersebut, untuk mencapai sasaran pertumbuhan rata-rata sebesar 7,6 persen per tahun dibutuhkan total investasi selama kumulatif lima tahun sebesar Rp 50,71 triliun (harga berlaku) atau meningkat rata-rata 23,5 persen per tahun. Peranan investasi masyarakat didorong meningkat dari 16,0 persen Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) pada tahun 2004 menjadi 24,4 persen PDRB pada tahun 2009; sedangkan peranan investasi pemerintah provinsi dan kabupaten diperkirakan meningkat dari 3,4 persen menjadi rata-rata 4,1 persen pada periode yang sama. Jumlah investasi pemerintah provinsi dan kabupaten/kota pada tahun 2006-2010 diperkirakan sekitar Rp 23 triliun.

Kebutuhan investasi tersebut terutama dibiayai dari tabungan masyarakat baik melalui investasi fasilitas maupun non fasilitas. Investasi fasilitas yang dilakukan oleh swasta baik melalui PMDN maupun PMA sangat tergantung pada seberapa menarik Jambi sebagai tempat investasi yang menguntungkan.

Untuk dapat meningkatkan investasi swasta masuk ke Jambi, maka perlu strategi, peraturan yang konsisten, penegakan hukum yang tegas, keamanan, dan iklim yang kondusif. Disamping itu perlu usaha-usaha gigih memperkenalkan Jambi melalui berbagai forum baik regional maupun internasional.

Berkenaan dengan itu peranan investasi swasta dalam mendorong pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jambi sangat besar. Salah satu cara mendorong peningkatan investasi swasta ke Jambi adalah dengan membuat regulasi yang dapat merangsang dan menguntungkan investor, disamping menciptakan suasana yang kondusif dan stabil.

Jika kekurangan investasi tersebut tidak bisa ditutupi, dikuatirkan pertumbuhan ekonomi akan rendah (jauh dibawah target) yang pada gilirannya jumlah pengangguran dan tingkat kemiskinanpun akan bertambah. Kondisi ini tentu tidak kita inginkan bersama, oleh karena itu mari kita dukung peningkatan investasi swasta (dalam dan luar negeri) ke Jambi, karena sebenarnya para investor terutama asing sudah menunggu, untuk masuk ke Jambi.

Kebutuhan investasi tersebut dibiayai terutama dari tabungan dalam negeri, baik pemerintah maupun masyarakat. Seiring meningkatnya penerimaan Pemerintah daerah serta relatif terkendalinya pengeluaran rutin, Penerimaan Pemerintah Daerah diperkirakan meningkat. Adapun tabungan masyarakat diperkirakan meningkat yang tergambar dari simpanan dana pihak ketiga di perbankan daerah Jambi. Dana-dana

masyarakat tersebut selain langsung diinvestasikan sendiri juga disalurkan antara lain melalui perbankan, pasar modal, atau lembaga keuangan lainnya seperti asuransi dan dana pensiun. Dengan pelaksanaan berbagai langkah terobosan, berbagai sumber dana dalam negeri diharapkan dapat ditingkatkan dan menjadi sumber dana investasi, antara lain melalui peningkatan penerimaan pajak dan bukan pajak, optimalisasi sumber daya alam (misalnya melalui pencegahan pencurian sumber daya laut, serta sumber daya hutan dan mineral), serta optimalisasi dana terkait keagamaan seperti dana wakaf, zakat, dan sebagainya.

Tabel 1.1
Kebutuhan Investasi
(Juta Rupiah).

Tahun	PDRB (H.Berlaku)	Pert. Ekonomi (%)	ICOR	I/PDRB	Investasi
2006	24.138.091	6,5	4,00	26,00	6.275.904
2007	28.965.709	7,1	3,90	27,69	8.020.605
2008	35.048.508	7,4	3,70	27,38	9.596.282
2009	42.759.180	7,8	3,50	27,30	11.673.256
2010	52.379.996	8,2	3,40	27,88	14.603.543
	Total Investasi				50.169.589

Tabel 1.2
Prediksi Perkembangan Kredit Perbankan di Jambi 2005-2010.

No.	Keterangan	2005	2006	2007	2008	2009	2010
1.	Dana Pihak Ketiga Bank (Negara) (Miliar Rp)	3.535	3.896	4.256	4.617	4.977	5.337
	Pertumbuhan (%)	8,93	10,19	9,25	8,47	7,81	7,24
2.	Dana Pihak Ketiga Bank (Swasta) (Miliar Rp)	1.602	1.721	1.840	1.959	2.078	2.197
	Pertumbuhan (%)	3,54	7,43	6,92	6,47	6,08	5,73
3.	Total Dana Pihak Ketiga di Perbankan (Miliar Rp)	5.137	5.617	6.096	6.576	7.055	7.534
4.	Asset Bak Pemerintah (Miliar Rp)	4.045	4.405	4.766	5.126	5.486	5.847
5.	Asset Bak Swasta (Miliar Rp)	1.686	1.813	1.940	2.066	2.193	2.320
6.	Total Asset Perbankan (Miliar Rp)	5.731	6.218	6.705	7.193	7.680	8.167
7.	Kredit Perbankan (Miliar Rp)	3.201	3.492	3.782	4.073	4.364	4.654
	Pertumbuhan (%)	11,78	9,08	8,32	7,68	7,13	6,66
8.	Kredit Usaha Kecil (KUK) (Miliar Rp)	1.791	2.056	2.321	2.587	2.852	3.117
	Pertumbuhan (%)	10,20	14,81	12,90	11,43	10,26	9,30

Tabel 1.3
Realisasi, Perkiraan dan Proyeksi PDRB Perkapita (Berdasarkan harga konstan) dan Penduduk Tahun 2000-2010.

Keterangan	Realisasi					Perkiraan	Proyeksi Jangka Menengah				
	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
PDRB Perkapita (Rp jt)	3,90	4,09	4,20	4,34	4,50	4,62	4,82	5,06	5,34	5,66	6,02
Pertumbuhan (%)	0,07	5,02	2,65	3,38	3,55	2,72	4,30	4,99	5,49	5,99	6,38
Penduduk (000 jiwa)	2.407	2.451	2.497	2.543	2.587	2.657	2.713	2.765	2.815	2.863	2.912
Pertumbuhan (%)	2,70	1,84	1,84	1,84	1,75	2,72	2,10	1,90	1,82	1,70	1,71

Tabel 1.4
Realisasi, Perkiraan dan Proyeksi Penduduk, Tenaga Kerja dan Tingkat Pengangguran Provinsi Jambi Tahun 2000-2010

No	Keterangan	Realisasi					Perkiraan	Proyeksi Jangka Menengah				
		2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
1	Jlh Penduduk (000 orang)	2.407	2.451	2.497	2.543	2.589	2.657	2.713	2.765	2.815	2.863	2.912
	Pertumbuhan (%)		1,84	1,84	1,84	1,84	2,63	2,10	1,92	1,81	1,71	1,70
2	Jlh Angkatan Kerja (000 orang)	1.441	1.460	1.489	1.560	1.604	1.639	1.681	1.724	1.766	1.809	1.852
	Pertumbuhan (%)		1,33	1,97	4,77	2,83	2,15	2,60	2,53	2,47	2,41	2,35
3	Jlh Kesempatan Kerja (000 org)	1.172	1.220	1.270	1.322	1.376	1.422	1.472	1.522	1.572	1.622	1.672
	Pertumbuhan (%)		4,08	4,08	4,08	4,09	3,38	3,51	3,39	3,28	3,18	3,08
4	Tingkat Pengangguran (000 org)	269	240	219	238	228	216	209	202	194	187	180
	Pertumbuhan (%)		-10,64	-8,76	8,77	-4,20	-5,26	-3,39	-3,51	-3,63	-3,77	-3,92
5	Persentase Pengangguran dari Angkatan kerja (%)	18,66	16,45	14,72	15,28	14,24	13,21	12,44	11,70	11,01	10,34	9,71

Tabel 1.5
Realisasi dan Proyeksi PDRB Provinsi Jambi (Rp milyar) Harga Konstan 2000

LAPANGAN USAHA	Realisasi					Perkiraan	Proyeksi Jangka Menengah				
	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
1. Pertanian	2.939	3.093	3.308	3.444	3.586	3.677	3.880	4.126	4.374	4.588	4.819
2. Pertambangan & Pengecilian	1.222	1.535	1.493	1.493	1.471	1.593	1.670	1.761	1.866	1.985	2.122
3. Industri Pengolahan	1.408	1.476	1.541	1.537	1.556	1.656	1.831	2.012	2.220	2.470	2.716
4. Listrik, Gas & Air Bersih	55	58	68	74	86	93	103	114	126	138	151
5. Bangunan	205	204	263	344	482	512	567	611	673	755	828
6. Perdag., Hotel & Restoran	1.533	1.588	1.649	1.809	1.893	2.012	2.150	2.303	2.463	2.684	2.934
7. Pengangkutan & Komunikasi	750	811	843	879	943	1.014	1.055	1.130	1.215	1.312	1.485
8. Keu. Persew & Jasa Persh	364	332	358	414	498	551	572	598	655	718	789
9. Jasa-Jasa	907	938	967	1.048	1.121	1.168	1.245	1.333	1.433	1.547	1.678
Total PDRB	9.382	10.035	10.490	11.044	11.636	12.276	13.074	13.989	15.024	16.196	17.524
Pertumb.PDRB (%)	2,77	6,96	4,54	5,28	5,36	5,50	6,50	7,00	7,40	7,80	8,20

Tabel 1.6
Realisasi dan Prediksi Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Jambi 2000-2010 (dalam %)

LAPANGAN USAHA	Realisasi					Perkiraan	Proyeksi Jangka Menengah				
	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
1. Pertanian	12,05	5,23	6,98	4,09	4,13	2,53	5,54	6,33	6,01	4,88	5,05
2. Pertambangan & Pengecilian	51,02	25,55	-2,68	-0,01	-1,48	8,30	4,83	5,43	5,93	6,42	6,90
3. Industri Pengolahan	-40,59	4,81	4,38	-0,21	1,24	6,36	10,59	9,92	10,34	11,24	9,97
4. Listrik, Gas & Air Bersih	22,79	6,04	17,66	8,89	15,60	7,83	10,62	10,65	10,66	9,44	9,54
5. Bangunan	-2,65	-0,04	28,55	30,90	39,98	6,30	10,70	7,84	10,04	12,23	9,66
6. Perdag., Hotel & Restoran	9,23	3,63	3,85	9,68	4,64	6,30	6,86	7,08	6,95	8,97	9,35
7. Pengangkutan & Komunikasi	17,59	8,16	3,96	4,32	7,21	7,60	4,02	7,09	7,49	8,01	13,22
8. Keu. Persewaan & Jasa Persh	15,67	-8,93	7,74	15,85	20,17	10,74	3,82	4,53	9,45	9,67	9,91
9. Jasa-Jasa	26,65	3,47	3,04	8,44	6,93	4,16	6,62	7,11	7,50	7,90	8,52
Pertumbuhan Ekonomi	2,77	6,96	4,54	5,28	5,36	5,50	6,50	7,00	7,40	7,80	8,20

Atas dasar program prioritas tersebut maka akan diimplementasikan kedalam rencana kerja pembangunan sebagai berikut :

- 1) Peningkatan kualitas pendidikan dengan mengalokasikan dana sebesar 20% dari anggaran pembangunan dan mendorong dunia usaha di Propinsi Jambi untuk berpartisipasi memberikan beasiswa baik pada tingkat Sekolah Dasar, SLTP, SLTA sampai tingkat Perguruan Tinggi bagi siswa/mahasiswa yang tidak mampu dan berprestasi.
- 2) Peningkatan status jalan antara lain jalan Bangko - Kerinci menjadi Jalan Nasional dan jalan Jangkat - Batang Asai menjadi Jalan provinsi agar terjadi mobilitas pembangunan secara lebih cepat. Kami juga akan mendorong agar seluruh Pemerintah Kabupaten/Kota memprioritaskan pembangunan infrastruktur jalan sesuai dengan kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah propinsi.
- 3) Meningkatkan efektivitas pelayanan publik oleh instansi pemerintah sehingga efisien dari sisi waktu dan biaya melalui pembentukan perda transparansi dan akuntabilitas publik.
- 4) Menjadikan Jambi sebagai sentra berbagai komoditas unggulan dari sektor pertanian, perkebunan, perikanan dan peternakan melalui pengembangan Badan Usaha Milik Daerah yang bergerak di sektor pertanian, perkebunan, perikanan dan peternakan terutama dalam pengadaan benih dan bibit yang bermutu.
- 5) Peningkatan kualitas kesehatan sehingga tercapai Jambi Sehat tahun 2008
- 6) Peningkatan kesetaraan jender terutama dengan memberikan akses yang lebih luas kepada kaum perempuan untuk duduk dalam jabatan struktural di pemerintahan.
- 7) Peningkatan status Bandara Sultan Thaha Syaifuddin menjadi Bandara Internasional dan melanjutkan penyelesaian pembangunan Pelabuhan Samudra Muara Sabak.
- 8) Peningkatan kapasitas kelistrikan baik PLTA, Gas, Diesel maupun Panas Bumi.